

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Ombudsman Angkat Bicara

Soal Rumah DP Nol Rupiah Rentan Mangkrak

JAKARTA - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya meminta dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan yang melibatkan BUMD DKI, PD Sarana Jaya tidak mengganggu program rumah DP Rp0. "Karena sudah ada pelaksanaannya maka harus dilaksanakan sampai tuntas," kata Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Teguh menyatakan, pengadaan rumah DP Rp0 yang menjadi program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak boleh berhenti karena sudah berjalan pelaksanaannya ■



Karena sudah ada pelaksanaannya maka harus dilaksanakan sampai tuntas".

Teguh P Nugroho
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya

Selain itu, program rumah DP Rp0 juga sudah jadi bagian dari perencanaan dan penganggaran.

Sehingga proyek tersebut tidak terhambat meskipun PD Sarana Jaya sebagai pelaksana harus menjalani penyelidikan dugaan korupsi pengadaan lahannya. "Seharusnya tidak menghambat programnya, selama proses perizinan sudah sesuai dengan aturan perundangan," ujar Teguh.

Teguh menyatakan, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya juga akan mengawasi proses hukum tindak pidana dugaan PD Sarana Jaya terkait pengadaan lahan rumah DP Rp0 yang ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengharapkan, program rumah DP Rp0 tidak berhenti, meski ada dugaan korupsi oleh PD Sarana Jaya selaku BUMD DKI pengelola program strategis itu.

"Terkena dampak sudah pasti, tapi untuk dihentikan saya kira tidak, karena ini salah satu program strategis yang ditunggu oleh warga Jakarta. Jangan sampai karena ada kasus warga yang dikorbankan," tutur Ab-

dul Aziz.

Untuk mendalami dugaan korupsi pada pembelian aset-aset PD Sarana Jaya, Abdul mengatakan pihaknya akan memanggil Sarana Jaya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. "Ya mungkin pekan depan (dipanggil) tapi agendanya bukan hanya itu ada beberapa agenda lain," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Dalam situs resminya, Sarana Jaya saat ini menangani program-program strategis daerah seperti Rumah DP Rp0 dan Penataan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang.

Penyidik Bareskrim Mabes Polri telah memeriksa sejumlah saksi dari karyawan PD Sarana Jaya terkait dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pengadaan lahan rumah DP Rp0.

Sementara itu, Direktur Utama PD Sarana Jaya Yoori C Pinontoan belum bisa memberikan keterangan pemeriksaan tersebut terkait dengan dugaan korupsi lahan rumah DP Rp0 atau yang lainnya.

"Saat ini kami belum bisa (memberi pernyataan), karena masih dalam permintaan keterangan. Terima kasih," tutur Yoori. (ibl)